

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
(PAMSIMAS) DI KAMPUNG ASA KECAMATAN BARONG
TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT**

Elisabet Debby Jenau, Enos Paselle

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 4, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kampung Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Pengarang : Elisabet Debby Jenau

NIM : 1702015019

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 30 Oktober 2024

Pembimbing,



Dr. Eros Paselle, M.AP
NIP 19740524 200501 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume : 12	
Nomor : 4	
Tahun : 2024	
Halaman : 1291-1297	

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KAMPUNG ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT

Elisabet Debby Jenau ¹, Enos Paselle ²

Abstrak

Kajian ini hakikatnya berguna untuk menjabarkan penerapan dari kebijakan. Telaah dilakukan secara kualitatif deskriptif. Sudut pandang penelitian ini berfokus pada komunikasi, sumberdaya, pendisposisian, strukturisasi birokrasi, serta pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Informan utama penelitian ini adalah staff dan masyarakat Kampung Asa. Data dikumpulkan secara observasional, interview, dan pendokumentasian data. Data tersebut dianalisa secara interaktif dengan tahap pengumpulan, pembuangan data, penyajian, serta verifikasi. Kajian ini menemukan bahwa: 1) Kebijakan telah berjalan cukup baik dalam beberapa aspek namun masih memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat. Pada aspek komunikasi, pelaksanaan program telah dilakukan dengan baik melalui rapat dan sosialisasi, meskipun partisipasi warga masih terbatas. Aspek sumber daya, terutama manusianya masih minim, karena keterlibatan masyarakat yang rendah. Namun, dari sisi anggaran, telah tersedia dana yang memadai dan penerapannya dilakukan secara transparan. Pada aspek disposisi, implementor menunjukkan komitmen dan keterbukaan informasi yang baik. Struktur birokrasi dalam program ini juga sudah terorganisir dengan jelas sesuai dengan SOP, walaupun peran dalam struktur organisasi masih didominasi oleh staf Kampung Asa. 2) Faktor utama yang mendukung adalah adanya bantuan dari pemerintah kabupaten dan desa kepada Kampung Asa, ditambah dengan semangat tinggi dari masyarakat. Sebaliknya, faktor yang menghambat meliputi jarak sumber air yang jauh, sulitnya akses menuju sumber air, dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung.

Kata Kunci : *Penyediaan Air Minum, Sanitasi Lingkungan, Partisipasi Masyarakat*

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kesatuan, memiliki air sebagai salah satu kekayaannya. Air, sebagaimana diketahui memiliki peran mendasar dalam menunjang kelangsungan hidup berbagai makhluk hidup, khususnya manusia,

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: debbyjenau21@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar. Air diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari memasak, minum, mandi, hingga keperluan industri. Karena itu, air tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga peran sosial yang besar, sehingga penting bagi semua pihak untuk menyadari hal ini agar dapat meningkatkan dan menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Akibat fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya, air yang dulunya merupakan barang publik yang melimpah dan dapat diakses dengan mudah, kini menjadi sumber daya yang semakin langka akibat proses privatisasi dan komersialisasi. Padahal, hal ini sejatinya telah diatur dalam dasar hukum negara. Ketimpangan akses terhadap air minum di berbagai wilayah Indonesia memaksa pemerintah untuk terlibat dalam penyediaan layanan air, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun lainnya. Sebagai solusi, pemerintah daerah menciptakan PDAM sebagai salah satu opsi pemecahan masalah. Namun, pendekatan pasar yang digunakan dalam distribusi air ini justru memberikan dampak negatif, karena masyarakat miskin kesulitan untuk mengakses layanan air bersih yang seharusnya tersedia.

Pada prinsipnya, penyediaan air minum dan sanitasi untuk seluruh warga Indonesia adalah kewajiban pemerintah. Untuk menjalankan tanggung jawab ini, pemerintah mendirikan PDAM sebagai lembaga yang bertujuan menjamin pasokan air bersih serta mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di beberapa daerah, terutama yang terletak di kawasan terpencil dengan medan yang sulit, sering terjadi kekurangan air karena jaringan pipa PDAM belum mencakup seluruh wilayah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengembangkan kebijakan berbasis masyarakat yang dikenal sebagai PAMSIMAS, yang diatur dalam Kepdirken CiptaKarya Nomor. 38/KPTS/DC/2017 tentang penyediaan air yang bersih bagi masyarakat.

Kampung Asa adalah wilayah yang mendapat penyediaan air bersih dan sanitasi. Implementasi kebijakan ini dilaksanakan secara selektif oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kutai Barat. Tujuan utamanya adalah menanggulangi masalah kekurangan air dan memastikan distribusi air yang merata. Program ini mencakup pembangunan saluran air yang langsung mengalir ke rumah-rumah warga untuk memudahkan akses. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi beberapa kendala, seperti kesulitan air mengalir ke tandon rumah warga, yang mengharuskan beberapa warga menggunakan pompa tambahan. Selain itu, terdapat pula kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai informasi terkait program ini, serta sejumlah warga yang kesulitan berpartisipasi karena terbentur masalah biaya.

Kerangka Dasar Teori *Kebijakan Publik*

Konsep ini terkait dengan instrumen vital karena digunakan pemangku kepentingan guna mengatur, mengarahkan, dan mengelola berbagai aspek

kehidupan masyarakat. Kebijakan publik tidak hanya mencakup peraturan dan regulasi, tetapi juga mencakup program, rencana tindakan, dan upaya lain yang perlu dilakukan (Nur & Guntur, 2019). Sejalan dengan pendapat tersebut, Mustari (2015) menjelaskan bahwa kebijakan, dalam konteks publik terkait dengan perumusan kebijakan yang dilakukan secara hirarkis.

Implementasi Kebijakan Publik

Konsep implementasi terkait erat dengan penerapan kebijakan guna memberikan efek secara praktis dan menimbulkan suatu dampak tertentu (Harsono, 2020). Selain itu, implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan oleh badan publik dalam rangka meraih tujuan yang dimuat pada rangkaian keputusan sebelumnya. Berbagai tindakan tersebut terdiri dari beragam upaya guna mengubah keputusan ke dalam suatu tindakan operasional dalam suatu periode ataupun untuk meneruskan berbagai usaha dalam proses pencapaian perubahan kecil dan besar yang ditetapkan dengan berdasarkan keputusan kebijakan (Mustari, 2015). Lebih lanjut, Sutmasa (2021) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan intervensi atau sebuah manipulasi atas segala aspek tertentu dalam berjalannya kehidupan bersama, dengan cakupan komunikasi, sumberdaya, pendisposisian, hingga hirarki birokrasi.

Definisi Kosepsional

Pelaksanaan kebijakan terkait pamsimas merupakan langkah konkret yang diambil oleh pihak pelaksana kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan air dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat.

Metode Penelitian

Telaah dilakukan secara kualitatif deskriptif. Sudut pandang penelitian ini berfokus pada komunikasi, sumberdaya, pendisposisian, strukturisasi birokrasi, serta pendukung dan penghambat dalam penerapannya (Kadji, 2015). Informan utama penelitian ini adalah staff dan masyarakat Kampung Asa. Data dikumpulkan secara observasional, interview, dan pendokumentasian data. Data tersebut dianalisa secara interaktif dengan tahap pengumpulan, pembuangan data, penyajian, serta verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program Penyediaan Air Minum hingga Sanitasi Berfokus Pada Masyarakat

Program ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UUD RJPN 2005-2025. Cakupan program ini mencakup lima aspek utama, yaitu: 1) penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan lembaga di tingkat lokal; 2) menciptakan perilaku yang higienis; 3) membangun air dan

infrastrukturnya yang memadai; 4) memberikan suntikan dana; serta 5) mempersiapkan dukungan untuk menciptakan manajemen yang baik. Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah di daerah pedesaan dan kawasan terpencil, agar dapat memperoleh air yang berkualitas (Firdaus, 2020).

Penciptaan program tersebut, hakikat utamanya adalah memperdayakan serta memperkenalkan penggunaan air yang layak digunakan untuk menghasilkan warga yang sehat dengan patokan utama dalam pelerapannya adalah basis masyarakat. Selain itu, penerapannya adalah bentuk nyata dari upaya pemerintah, baik pusat maupun lokal di dalam proses pembangunan manusia yang berkualitas di setiap wilayahnya. Tidak hanya itu, pelerapannya adalah suatu upaya guna memperbaiki kondisi, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Namun di sisi lain, program ini juga adalah upaya untuk menekan penyakit tidak menular secara signifikan, yakni diare atau penyakit lainnya.

Penerapan Kebijakan

1. Komunikasi

Program ini hakikatnya menempatkan masyarakat sebagai pihak yang berperan utama sekaligus bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan program ini (Chusniati 2018). Implementasi program ini telah dilakukan di Kampung Asa, Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan fokus komunikasi yang meliputi transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi, ditemukan bahwa dalam implementasinya komunikasi telah dilakukan dengan baik. Pada transmisi, dinyatakan baik karena ditandai dengan adanya rapat dan sosialisasi yang diadakan bersama dengan masyarakat. Selain itu, proses penyampaian komunikasi kebijakan ini juga telah dilakukan sedari awal program ini dibentuk.

Pada aspek kejelasan dan konsistensi, masyarakat Kampung Asa sebagai pelaku utama dalam program ini juga telah merasa ada kejelasan informasi yang diterima. Hal ini terjadi karena sering diadakan rapat dan pertemuan 2 minggu 1 kali yang dilaksanakan oleh Kepala Kampung Asa dan Staf Kampung Asa agar tujuan awal, dan kesepakatan tidak tiba-tiba berubah sehingga apa yang dikomunikasikan selaras dengan apa yang dikerjakan. Namun, ditemukan pula bahwa dalam hal ini, rapat yang dilaksanakan masih minim masyarakat yang mengikuti, sehingga di sisi lain ada kemungkinan beberapa masyarakat belum mendapatkan informasi dengan baik.

2. Sumber Daya

Penerapan kebijakan yang melibatkan masyarakat memerlukan dukungan sumber daya yang optimal, mencakup kualitas tenaga kerja, alokasi dana, serta sarana penunjang. Akan tetapi, kajian yang telah dilakukan mengungkapkan jika aspek sdm dalam program ini belum memadai. Hal ini terlihat dari fakta bahwa pelaksanaan program lebih banyak didominasi oleh kepala desa dan perangkat kampung saja.

Pada konteks tersebut, minimnya keikutsertaan dari masyarakat adalah akibat dari tidak beraninya masyarakat itu sendiri berperan secara lebih besar dalam implementasi program. Hal ini terjadi karena satu alasan utama yaitu tidak mengerti bagaimana cara menjalankan program ini. Padahal, seharusnya masyarakat ikut ambil bagian dan berperan aktif dalam program tersebut, dikarenakan masyarakat Kampung Asa merupakan tokoh utama yang sekaligus bertanggung jawab dalam program.

Lebih lanjut, terkait sumber daya anggaran dalam melaksanakan kebijakan dapat disimpulkan bahwa telah cukup dan memadai dalam melaksanakan program ini. Pernyataan ini diutarakan karena dana yang telah disepakati sejak awal diimplementasikan sesuai dengan rencana tersebut. Tidak hanya itu, penggunaan anggaran tersebut juga telah menerapkan prinsip transparansi. Hal tersebut terlihat dari adanya informasi publik berupa banner penggunaan dan yang dipasang di kantor kepala Kampung Asa.

3. Disposisi

Disposisi merujuk pada sifat atau karakter yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi ini memainkan peran penting dalam menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan kebijakan. Ketika pelaksana kebijakan menunjukkan sikap positif, mereka cenderung lebih mampu menjalankan kebijakan dengan efektif, sehingga tujuan yang dirancang oleh pembuat kebijakan dapat tercapai dengan lebih optimal (Mulyadi, 2019). Kajian ini menemukan bahwa pelaksana kebijakan menunjukkan sikap yang positif. Komitmen mereka dalam menjalankan program serta keterbukaan yang jujur dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat menjadi indikasi utama dari sikap baik yang mereka tunjukkan.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan publik hanya dapat diterapkan jika pelaksanaannya didukung oleh kewenangan yang diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan adanya struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa struktur yang ada sudah memadai, terperinci, dan terorganisir dengan jelas. Selain karena adanya hirarki kepemimpinan, juga dikarenakan dalam pengimplementasian kebijakan, tindakan serta kegiatan sesuai dengan SOP. Namun, jika dilihat berdasarkan jumlah masyarakat yang ikut serta dalam struktur organisasi hanya sedikit, sehingga struktur organisasi dalam program ini lebih banyak didominasi oleh staf Kampung Asa.

Pendukung dan Penghambat Penerapan Kebijakan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan dua faktor utama yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Pertama, dukungan yang diberikan oleh

pemerintah kabupaten dan desa yang menciptakan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Pemerintah Kampung Asa dalam menjalankan program tersebut. Kedua, tingginya antusiasme masyarakat, yang timbul karena harapan mereka agar kebijakan ini dapat mempermudah akses mereka terhadap air bersih.

Beberapa aspek yang menghambat yaitu jarak yang jauh antara sumber air dan lokasi pemukiman. Hal ini mengharuskan pemasangan lebih banyak pipa. Selain itu, medan yang terjal memperburuk kondisi, menyulitkan akses ke sumber air dan membuat proses pemasangan pipa menjadi lebih lama. Faktor penghambat lainnya adalah kondisi lingkungan, di mana pipa distribusi harus melewati jalan umum untuk mencapai tandon dari sumber air. Terakhir, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan program menyebabkan dominasi staff Kampung Asa dalam mengurus pelaksanaan program ini.

Penutup

Kesimpulan

Kajian ini menghasilkan: 1) Penerapan kebijakan telah berjalan cukup baik dalam beberapa aspek namun masih memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat. Pada aspek komunikasi, pelaksanaan program telah dilakukan dengan baik melalui rapat dan sosialisasi, meskipun partisipasi warga masih terbatas. Aspek sumber daya, terutama manusianya masih minim, karena keterlibatan masyarakat yang rendah. Namun, dari sisi anggaran, telah tersedia dana yang memadai dan penerapannya dilakukan secara transparan. Pada aspek disposisi, implementor menunjukkan komitmen dan keterbukaan informasi yang baik. Struktur birokrasi dalam program ini juga sudah terorganisir dengan jelas sesuai dengan SOP, walaupun peran dalam struktur organisasi masih didominasi oleh staf Kampung Asa. 2) Faktor utama yang mendukung pelaksanaan program adalah adanya bantuan dari pemerintah kabupaten dan desa kepada Kampung Asa, serta semangat yang tinggi dari masyarakat. Di sisi lain, faktor yang menghambat pelaksanaan program meliputi jarak yang jauh dari sumber air, kesulitan dalam mengakses sumber air, serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

Saran

Saran yang dapat diberikan atas kajian ini adalah: 1) Perlu adanya pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pengelola dan masyarakat lokal mengenai teknis pengelolaan air minum dan sanitasi, manajemen operasional dan pemeliharaan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi dengan baik. 2) Meningkatkan koordinasi antara pemerintah setempat dengan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan pembentukan forum komunikasi rutin yang melibatkan semua pihak.

Daftar Pustaka

- Chusniati, S. (2018). Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Mediasosial: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 57-64. doi: <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i2.216>
- Firdaus, R. (2020). Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Baebunta Selatan Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal La Galigo: Public Administration Journal*, 3(2), 1-8. doi: <https://doi.org/10.35914/ilagaligo.475>
- Harsono, H. (2020). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Mulyadi, D. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 66-80. doi: <https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.208>
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: UNM Publisher.
- Rizani, M. D., Rahayu, T. I., & Permana, I. (2021). Implementasi Kebijakan Sanitasi Saluran Air di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. *Public Service and Governance Journal*, 2(1), 12-20. doi: <https://doi.org/10.56444/psgj.v2i1.598>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawala*, 4(1), 25-37. doi: <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>